

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG
MEMUAT ISI AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI
KLAS 1A PADANG**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik
Magister Kenotariatan*



Diajukan Oleh :

PERNANDO SIMBOLON

NIM 1720123040

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Yuslim, SH, MH.**
- 2. Dr. Khairani, SH., MH**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MEMUAT ISI AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG**

Nama : **PERNANDO SIMBOLON**


NIM : **1720123040**

Program Studi : **MAGISTER KENOTARIAN**

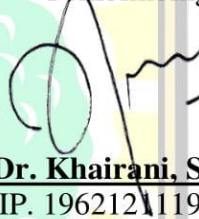
Tesis ini telah diuji dan di pertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 April 2021

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing 1


Dr. Yuslim, SH., MH.
NIP. 195707061983031008.

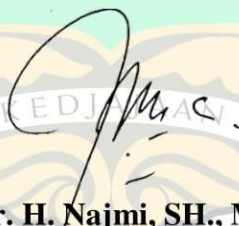
Pembimbing 2


Dr. Khairani, SH., MH
NIP. 196212111989012001

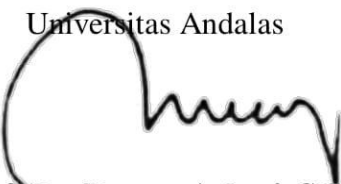
Komisi Penguji


Frenadin Adegustara, SH., MS
NIP. 196408231988111001


Dr. Hengki Andora, SH. LL.M
NIP. 198006162005011003


Dr. H. Najmi, SH., MH
NIP. 195904081986031003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas


Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 196911181994031002

Ketua Program Studi
Magister Kenotarian


Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn
NIP. 197505102005011003

PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

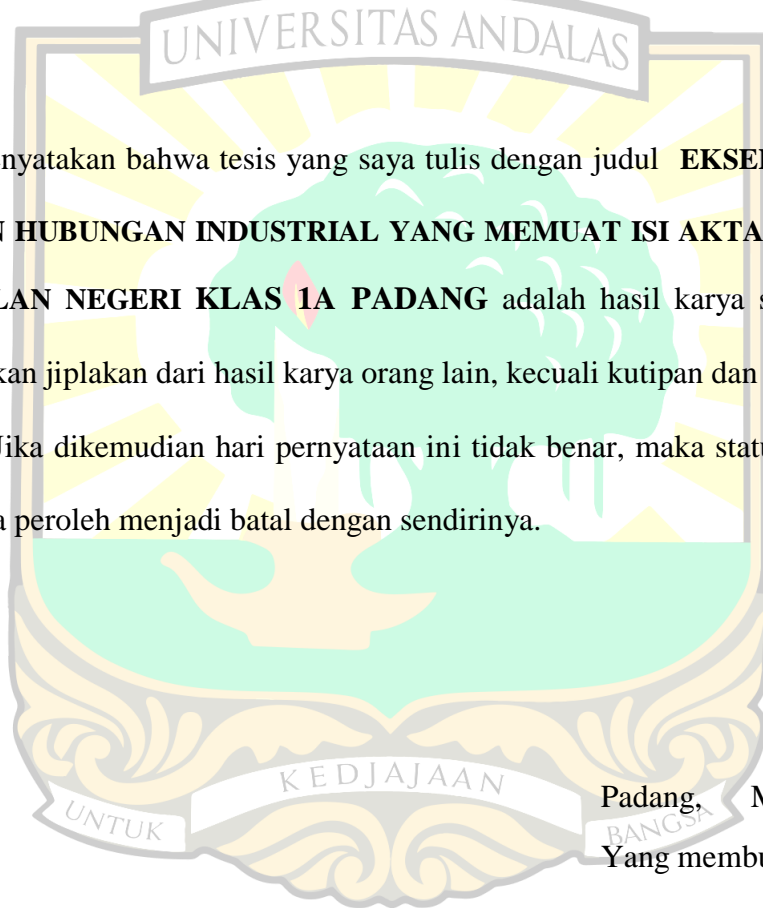
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **PERNANDO SIMBOLON**

Nomor Induk Mahasiswa : **1720123040**

Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MEMUAT ISI AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.



Padang, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,

PERNANDO SIMBOLON
1720123040

**Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Memuat Isi
Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA**
(Pernando Simbolon, 1720123040, Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri kelas IA Padang sebagaimana Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg, para pihak bersengketa telah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian, kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dimuat dalam suatu Putusan Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa isi surat perdamaian untuk dibuatkan akta perdamaian, kemudian Majelis Hakim Pada hari Senin, 2 April 2018 membacakan Putusan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut. Namun, salah satu pihak tidak menjalankannya sehingga dilakukan permohonan Eksekusi Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang akan tetapi tidak ada kepastian hukum, seharusnya Ketua Pengadilan memperingatkan dan memerintahkan pihak itu untuk melaksanakan Putusan dalam waktu selambat-lambatnya 8 hari sebagaimana dijamin dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR. Permasalahan dalam penelitian adalah : 1. Eksekusi Putusan PHI yang memuat isi akta perdamaian, 2. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi Putusan yang memuat isi akta perdamaian, 3. Upaya pengefektifan eksekusi Putusan yang harus dilakukan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*Fact Finding*), yang menuju pada identifikasi (*problem identification*) yang akhirnya ke penyelesaian masalah (*problem solution*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Yayasan tidak menjalankan kewajiban sesuai isi akta perdamaian dalam Putusan tersebut, kemudian Pengadilan juga tidak mampu mengeksekusi putusan karena tidak adanya anggaran dari Negara padahal UU PPHI telah menegaskan bahwa biaya eksekusi adalah gratis. Kendala yang dihadapi adalah Pengadilan tidak menemukan barang atau aset milik Yayasan dalam Isi Akta Perdamaian, sehingga Pengadilan tidak mampu melakukan sita eksekusi. Solusi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Pihak Penggugat dalam pembuatan Surat Perjanjian Perdamaian seharusnya mencantumkan dan memuat jelas harta benda atau aset-aset yang dimiliki oleh Yayasan, agar dapat dijadikan jaminan sita eksekusi apabila pihak Yayasan tidak melaksanakan isi Akta Perjanjian Perdamaian. Ketua Pengadilan melalui Panitera dan Jurusita seharusnya mampu melaksanakan wewenang eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa terbebani oleh tidak adanya anggaran biaya eksekusi. Ketua Pengadilan harus membuat pedoman khusus bagi internal Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan atau dengan kata lain terbentuknya Standar Operasi Prosedur (SOP) Eksekusi Putusan Pengadilan.

Kata kunci: Eksekusi Putusan, Akta Perdamaian, Perselisihan Hubungan Industrial

**Execution of Industrial Relations Court Decisions which contain contents
Deed of Peace at the Class IA Padang District Court**

(Pernando Simbolon, 1720123040, Master Program of Notary, Faculty of Law,
Andalas University)

ABSTRACT

In the case of Industrial Relations Dispute Resolution at the Padang IA class District Court as referred to in Decision Number 4 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN Pdg, the disputing parties have reconciled and made a peace letter, then submitted it to the Panel of Judges to be contained in a Court Decision, The Panel of Judges first examined the contents of the conciliation letter to make a peace deed, then the Panel of Judges On Monday, April 2 2018 read out a decision ordering the Plaintiff and Defendant to obey the contents of the Peace Deed. However, one of the parties did not carry out it so a request for the Execution of the Decision was carried out to the Chairperson of the Padang Class IA District Court but there was no legal certainty, the Chair of the Court should have warned and ordered that party to implement the decision within no later than 8 days as guaranteed in Article 195- 208 HIR and Articles 224-225 HIR. The research problems are: 1. Execution of PHI decisions containing the contents of the peace deed, 2. Constraints faced in executing decisions containing the contents of the peace deed, 3. Efforts to make effective execution of decisions that must be carried out. The method used is sociological juridical meaning that research is carried out on the real situation of the community with the aim and purpose of finding facts (Fact Finding), which leads to identification (problem identification) which ultimately leads to problem solving. The results showed that the Foundation did not carry out its obligations according to the contents of the peace deed in the decision, then the Court was also unable to execute the decision because there was no budget from the State even though the PPHI Law had confirmed that the execution fee was free. The obstacle faced was that the Court did not find any goods or assets belonging to the Foundation in the contents of the Peace Deed, so that the Court was unable to seize the execution. The solution found in this research is that the Plaintiff in the drafting of the Peace Agreement should include and clearly state the assets or assets owned by the Foundation, so that it can be used as collateral for execution if the Foundation does not implement the contents of the Peace Agreement Deed. The Chief Justice through the Registrar and Bailiff should be able to exercise the authority of execution in accordance with applicable legal provisions without being burdened by the absence of a budget for execution costs. The Chief Justice must make specific guidelines for the internal Court in carrying out the execution of Court Decisions or in other words the establishment of Standard Operating Procedures (SOP) for the Execution of Court Decisions.

Keywords: Decision Execution, Peace Deed, Industrial Relations Disputes